

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Salah satu hal yang menandai kemajuan suatu Negara adalah penerapan sistem informasinya. Tidak terkecuali Negara Indonesia, yang tidak boleh mengabaikan perkembangan informasi. Kemajuan teknologi yang terjadi sekarang ini menunjukkan bahwa dunia teknologi informasi saat ini telah berkembang pesat. Jika Indonesia ingin bersaing dengan Negara lain, Indonesia harus memiliki Sistem Informasi yang baik. Sistem informasi yang baik akan dapat menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan tepat waktu. Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat membawa dunia memasuki era baru menuntut informasi yang lebih cepat. Banyak perubahan yang terjadi pada lingkungan bisnis maupun pemerintahan seperti perubahan teknologi produksi, teknologi informasi dan struktur organisasi, yang mendorong organisasi untuk terus berupaya meningkatkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuannya.

Seiring dengan reformasi tersebut pemerintah melakukan perubahan penting di bidang keuangan negara untuk mendukung agar informasi dibidang keuangan negara dihasilkan dengan tepat. Seperti halnya Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang sistem informasi yang prima dan mampu membantu serta menjawab kebutuhan pemakai dari informasi akuntansi. Sama halnya dengan kemajuan suatu Negara dengan penerapan sistem informasinya, sistem informasi akuntansi di pemerintahan juga menuntut sistem informasi yang lebih baik untuk

mendukung agar informasi dibidang keuangan daerah dihasilkan dengan tepat. Akuntansi keuangan daerah adalah suatu proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu daerah yang di jadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi dalam pihak-pihak yang memerlukan. Informasi yang di hasilkan adalah laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan keuangan daerah untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal, diperlukan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang memadai. Fungsi utama sistem informasi keuangan pemerintah daerah adalah membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah (penganggaran, pelaksanaan, pertanggung jawaban), menyusun laporan keuangan lebih efisien dan akurat, menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya, menyajikan informasi akurat secara efektif dan efisien yang akan di gunakan oleh pengguna laporan.

Jika di lihat dari sudut pandang pemerintahan, keberadaan teknologi informasi yang cepat, akurat dan dapat di percaya adalah sebagai suatu hal yang sangat penting peranannya mengingat pemerintah dalam tujuan jangka panjangnya harus memberikan pertanggungjawaban yang maksimal kepada masyarakat. Di era otonomi daerah saat ini, sistem Pemerintahan Daerah sudah berbeda dibandingkan dengan sistem pemerintah di era orde baru. Kalau di era orde baru, organisasi Pemerintah dan sistem informasinya ditentukan oleh pemerintah pusat, di era otonomi daerah ini pembentukan instansi pemerintah daerah termasuk sistem informasinya ditentukan oleh pemerintah daerah setempat. Oleh karena itu sistem informasi pada setiap daerah

bisa berbeda sesuai dengan perkembangan yang terjadi / kebutuhan di daerah masing-masing .

Sistem informasi akuntansi (SIA) merupakan subsistem dari sistem informasi manajemen yang mengolah data keuangan untuk memenuhi kebutuhan pemakai intern dan eksteren. Dalam badan usaha penerapan sistem dapat dilihat dari pemakai sistem dan kepuasan pemakai sistem tersebut komara (2005), dalam wahyuni. Laporan keuangan di gunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, Maka laporan pemerintahan daerah harus di sajikan secara relevan dan reliable. Untuk menghasilkan laporan yang baik maka pemerintah daerah perlu memiliki sistem akuntansi Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 24 tahun 2005, Tentang standar akuntansi pemerintahan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2005, Tentang Pengelolaan keuangan Negara serta Permendagri Nomor. 13 tahun 2006, Tentang Pengelolaan keuangan daerah yang di sempurnakan dengan permendagri no.59 tahun 2007 yaitu menggunakan basis modifikasian kas menuju akrual (*cash to wards accrual*) informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Pada Sistem Akuntansi di Pemerintahan Daerah, ketentuan umum prosedur akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisartan, sampai pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dapat di lakukan

secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Agar dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti tersebut di atas, maka informasi yang disajikan hendaknya memiliki nilai.

Adanya sistem informasi akuntansi pemerintahan, diharapkan akan menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pengeluaran Belanja Negara (APBN) serta pengelolaan/pengendalian keuangan dan Barang Milik Negara dan dapat menciptakan *Good Governance*. Terdapat beberapa alasan mengapa pemerintah daerah perlu membuat laporan keuangan, Dilihat dari segi internal laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintah dan unit kerja pemerintah daerah. Laporan bagi pihak internal merupakan bentuk pertanggungjawaban internal (*internal accountability*), yaitu pertanggung jawaban kepala daerah kepada pegawai Pemda dan DPRD. Sementara jika di lihat dari pihak eksternal laporan keuangan pemerintahan daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepala daerah kepada masyarakat umum, Invesor, Kreditur, Akademis, Pengamat dan industri nasional dan daerah, serta pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, Sosial, dan politik (*eksternal accountability*).

Sistem Informasi pemerintah ini mempunyai peran yang penting untuk mensukseskan pembangunan di suatu daerah. Sistem informasi yang baik, bisa

menciptakan kesatuan gerak dan langkah antar lembaga/dinas untuk mencapai tujuan. Jika sistem informasi antar lembaga/dinas tidak berjalan baik maka dimungkinkan terjadinya tumpang tindih kegiatan, bahkan bisa terjadi kegiatan yang saling bertentangan. Sistem informasi yang baik memungkinkan program-program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah bisa direspon oleh masyarakat sehingga bisa meningkatkan partisipasi masyarakat (Arifin, 2009).

Rejeki (2009) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Sistem Informasi akuntansi di lingkungan Pemerintahan Deli Serdang. Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa keseluruhan variabel bebas yaitu keterlibatan pemakai dalam proses pengembangan sistem, kemampuan teknik personal, ukuran organisasi, dukungan pimpinan bagian, formalisasi pengembangan sistem informasi, program pelatihan dan pendidikan pemakai, keberadaan konsultan, lokasi bagian sistem informasi, komitmen organisasi, dan motivasi kerja berpengaruh bersama-sama terhadap kinerja SIA .

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian yang di lakukan oleh Rejeki (2009). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada sampel. Penelitian sebelumnya dilakukan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Deli Serdang, sedangkan penelitian ini dilakukan di lingkungan Pemerintahan Daerah Serdang Bedagai. Alasan saya memilih tempat penelitian di lingkungan pemerintah daerah Serdang Bedagai adalah kabupaten ini merupakan salah satu contoh kabupaten pemekaran yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Untuk melihat perkembangan suatu daerah pemekaran, diperlukan adanya perbandingan kinerja SIA daerah

tersebut sebelum dan sesudah pemekaran. Dari hal ini akan terlihat, apakah terjadi perubahan (kemajuan) yang signifikan pada suatu daerah setelah dimekarkan khususnya pada sistem informasi akuntansinya. Alasan lain dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja SIA di lingkungan pemerintahan Serdang Bedagai. Oleh sebab itu dilakukan pula perbandingan antara daerah yang mekar dan daerah yang tidak melakukan pemekaran.

Sebagai salah satu contoh dari salah satu kabupaten baru yang relatif muda, tentunya Serdang Bedagai memiliki ketebatasan-keterbatasan, baik Sumber Dayanya, infrastruktur, dana, maupun kinerja sistem informasi akuntansinya. Kinerja sistem informasi akuntansi juga dapat berpengaruh pada keterlibatan pemakai dalam proses pengembangan sistem, kemampuan teknik personal, dukungan pimpinan bagian, formalisasi pengembangan sistem informasi, program pelatihan dan pendidikan pemakai, keberadaan konsultan, lokasi bagian sistem informasi, komitmen organisasi, dan motivasi kerja di Lingkungan Pemerintahan dalam menyajikan laporan keuangan yang baik. Pemerintah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang di perlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat di percaya sehingga di tuntutan untuk memiliki Sistem Informasi yang handal. Namun dalam kenyataanya sistem itu belum di manfaatkan sepenuhnya.

Dari penjelasan di atas, maka peneliti memilih judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Serdang Bedagai”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sistem informasi akuntansi pada pemerintahan daerah serdang bedagai?
2. Apa yang dapat dijadikan tolak ukur dalam penilaian kinerja sitem informasi akuntansi?
3. Apakah ada pengaruh keterlibatan pemakai dalam proses pengembangan sistem, kemampuan teknik personal, dukungan pimpinan bagian, formalisasi pengembangan sistem informasi, program pelatihan dan pendidikan pemakai, keberadaan konsultan, lokasi bagian sistem informasi, komitmen organisasi, dan motivasi kerja terhadap kinerja SIA pada pemerintahan Serdang Bedagai?
4. Bagaimana peranan SIA di lingkungan pemerintahan serdang bedagai?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah adanya keterlibatan pemakai dalam proses pengembangan sistem, kemampuan teknik personal, dukungan pimpinan bagian, formalisasi pengembangan sistem informasi, program pelatihan dan pendidikan pemakai, keberadaan konsultan, lokasi bagian sistem informasi, komitmen organisasi, dan motivasi kerja Yang Mempengaruhi

Kinerja Sistem Informasi Akuntansi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Serdang Bedagai.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah : Apakah keterlibatan pemakai dalam proses pengembangan sistem, kemampuan teknik personal, dukungan pimpinan bagian, formalisasi pengembangan sistem informasi, program pelatihan dan pendidikan pemakai, keberadaan konsultan, lokasi bagian sistem informasi, komitmen organisasi, dan motivasi kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja SIA pada pemerintahan Serdang Bedagai?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah mengetahui apakah faktor keterlibatan pemakai dalam proses pengembangan sistem, kemampuan teknik personal, dukungan pimpinan bagian, formalisasi pengembangan sistem informasi, program pelatihan dan pendidikan pemakai, keberadaan konsultan, lokasi bagian sistem informasi, komitmen organisasi, dan motivasi kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja SIA pada pemerintahan Serdang Bedagai

F. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang faktor-faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap kinerja Sistem Informasi Akuntansi pada pemerintahan Serdang Bedagai.
2. Sebagai referensi dan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem informasi di daerah pemekaran salah satunya adalah pemerintahan Serdang Bedagai.
3. Bagi mahasiswa/pihak lainnya sebagai referensi dalam rangka pengembangan penelitian sejenis.